

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, M. Z. (2015). Tinjauan atas Pelaksanaan Keuangan Desa dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 6(1), 61–76.
- Andriani, R. (2022). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Era Otonomi Daerah*. 2(2013), 242–260. Retrieved from <https://jurnal.desantapublisher.com/index.php/desanta/article/view/20>
- Aziz, N. L. L., & Eng, M. (2019). Membangun Identitas Nasional Dalam Perspektif Desentralisasi Dan Otonomi Daerah. *Masyarakat Indonesia*, 45(1), 47–61. Retrieved from <http://jmi.ipsk.lipi.go.id/index.php/jmiipsk/article/view/884>
- Badan Litbang Depdagri RI dan FISIPOL-UGM. (1991). *Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Tingkat II Dalam Rangka Otonomi Daerah Yang Nyata Dan Bertanggung Jawab*. Jakarta.
- Bappenas. (2003). *Perencanaan Pembangunan Nasional*. Jakarta: Bappenas TA-SRPP.
- Bastian, I. (2006). *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. (2002). *Akuntansi Sektor Publik; Akuntansi Keuangan Daerah* (Edisi Pert). Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah; Akuntansi Sektor Publik* (Edisi Revi). Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik; Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hendriko, D. P. (2021). Analisa Dan Klasifikasi Kemampuan Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Dalam Era Otonomi Daerah. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi, Bisnis & ...*, 1, 211–218. Retrieved from <https://ejurnal.umri.ac.id/index.php/sneba/article/view/2760>
- I Putu Santika, & Ida Bagus Made Punia Adnyana. (2022). Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Badung Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Journal of Applied Management Studies*, 3(2), 173–190. <https://doi.org/10.51713/jamms.v3i2.54>
- J. Davis, F. Schoorman, L. D. (1997). Toward a Stewardship Theory of Management. *Academy of Management Review*, 22, 20–47. Retrieved from <https://doi.org/10.2307/259223>
- Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure. *The Economic Nature of the Firm: A Reader*, Third Edition, 283–303. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511817410.023>

- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mahmudi. (2019). *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (Edisi Tiga). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2004). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Martia, C. (2023). *Optimalisasi Strategi Peningkatan Pemungutan Pajak Reklame Pada Badan*. 1038(33), 416–423.
- Muhammad Syukri, Saepul Pahmi, & Suandi, S. (2022). Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. *GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 2(1), 01–07. <https://doi.org/10.56910/gemilang.v2i1.87>
- Munandar, A., & Saputra. (n.d.). Analisa Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Paser. *Analisa Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Paser*, 4(3), 1482–1489. Retrieved from ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/jige
- Pemda. (2024). Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi Negeri Sailun Salimbai. Retrieved April 30, 2024, from Pemda website: <https://pemda.muarojambikab.go.id/main>
- Peraturan Pemerintah RI. (2024). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jambi.
- Peraturan Pemerintah RI. (2024). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jambi.
- Peraturan Pemerintah RI. (2024). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Jambi.
- Peraturan Pemerintah RI. (2024). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional*. Jambi.
- Peraturan Pemerintah RI. (2024). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah*. Jambi.
- Peraturan Pemerintah RI. (2024). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jambi.
- Peraturan Pemerintah RI. (2024). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jambi.

- Peraturan Pemerintah RI. (2024). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005*. Jambi.
- Peraturan Pemerintah RI. (2024). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jambi.
- Peraturan Pemerintah RI. (2024). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah*. Jambi.
- Peraturan Pemerintah RI. (2024). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan*. Jambi.
- Peraturan Pemerintah RI. (2024). *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah*. Jambi.
- Purwanti, D. (2021). Determinasi Kinerja Keuangan Perusahaan : Analisis Likuiditas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan (Literature Review Manajemen Keuangan). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(5), 692–698. <https://doi.org/10.31933/jimt.v2i5.593>
- Safitri, H., & Sasanti, Elin Erlina, N. (2022). Evaluasi Kinerja dan Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram*, 8(1), 1–15. <https://doi.org/10.32666/tatasejuta.v8i1.302>
- Safitri, S. (2016). Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Sejarah*, 5(9), 79–83. Retrieved from <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/view/278>
- Sari, R. K., Woestho, C., & Handayani, M. (2021). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pada Daerah Tertinggal di Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 21(1), 45–54. <https://doi.org/10.31599/jki.v21i1.324>
- Soeharjoto. (2018). Financial Capability and Performance of the Province of Kalimantan. *Akuntabel*, 15(2), 131–138.
- Sri Wardani, M. S. (2020). Analisis Kinerja Keuangan dan Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2015-2018. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 12(2), 6. Retrieved from <https://talenta.usu.ac.id/politeia/article/view/3955>
- Susanto, H. (2019). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. *Distribusi - Journal of Management and Business*, 7(1), 81–92. <https://doi.org/10.29303/distribusi.v7i1.67>
- Tandiasik, Y., Toatubun, N., & Thane, S. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Di Provinsi Papua. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 15(2), 98–110. <https://doi.org/10.55049/jeb.v15i2.230>
- Wahab, L. O. A. (2022). Evaluasi Kinerja Dan Kemampuan Keuangan Daerah

Pemerintah Kota Jayapura. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 14(2), 30–44.

Wellyan, V. R., Novaria, E., & Lisdiana, L. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. *KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian Dan Pengembangan*, 3(3), 216–232.
<https://doi.org/10.51878/knowledge.v3i3.2456>

Widya, S. (2021). *Kinerja Keuangan*. Unpri Press.